

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pajak mendanai pengeluaran publik. Sesuai aturan yang berlaku, masyarakat membayar pajak kepada negara. Karena pentingnya fungsi perpajakan, maka setiap orang wajib untuk mematuhi kewajiban perpajakannya. Tanpa peran pajak, sebagian besar fungsi pemerintah akan sulit dijalankan. Indonesia adalah negara berkembang dimana para pelaku bisnis mendukung perekonomian negara. Melalui hasil yang mereka hasilkan, para pelaku usaha tersebut memberikan kontribusi yang signifikan kepada negara dengan membayar pajak. Setiap perusahaan memiliki kebijakan akuntansi dan pajak khusus yang diikutinya saat menjalankan bisnis; dalam hal ini, kebijakan tersebut digunakan untuk perencanaan pajak yang menguntungkan pendapatan perusahaan. Pajak Pertambahan Nilai, juga dikenal sebagai PPN, PPN merupakan pajak yang dibebankan pada penjualan dan pembelian barang dan jasa yang disediakan oleh wajib pajak badan atau wajib pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Biaya harus ditanggung oleh pembeli karena PPN adalah pajak yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun ada kewajiban untuk mengumpulkan dan menyetor.

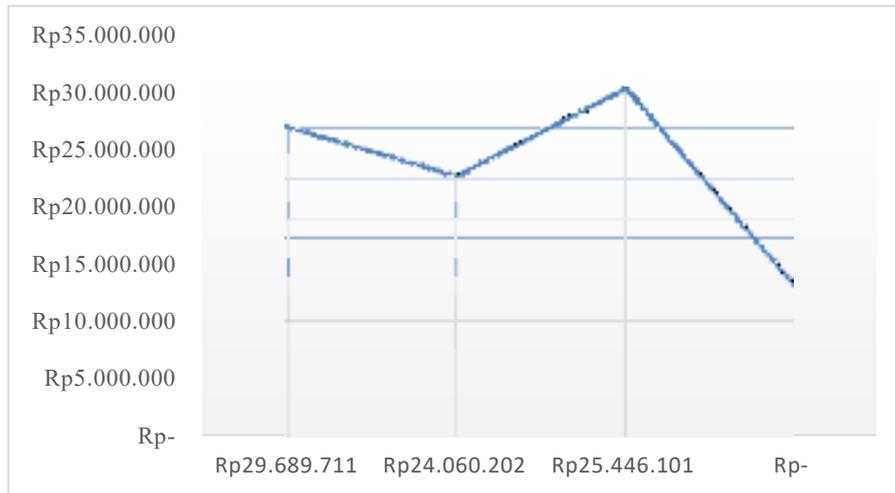
Metode pengakuan pendapatan akrual (juga dikenal sebagai "Metode Akrual") adalah metode akuntansi dimana pendapatan dan beban diakui atau dicatat pada saat transaksi terjadi daripada saat uang diterima. Ini adalah salah satu kebijakan akuntansi perusahaan. Ada berbagai jenis kebijakan akuntansi. Untuk pembayaran yang dilakukan atau transaksi yang diterima. Praktek pendokumentasian transaksi akuntansi pada saat transaksi didokumentasikan pada saat uang diterima atau pada saat pengembalian diberikan dikenal dengan istilah pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode kas (Cash Basis). Akuntansi berbasis kas mencatat pendapatan segera setelah diterima dan pengeluaran segera setelah dicairkan. Pajak timbul saat aktivitas penjualan baik pada saat diterima ataupun diserahkannya barang dan jasa tersebut.

PPN dilaksanakan berdasarkan UU RI Nomor 8 Tahun 1983 dan perubahannya, yang meliputi UU RI Nomor 11 Tahun 1994 dan perubahannya, UU RI Nomor 18 Tahun 2000, dan UU RI Nomor 42 Tahun 2009 yang berkaitan dengan pajak pertambahan nilai atas penjualan barang mewah. Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak (BKP) yang dipungut dengan tarif 11% diberlakukan untuk konsumsi dalam negeri. PPN adalah pajak atas tambahan nilai tambah atas barang dan jasa diproduksi atau ditawarkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Salah satu pajak tersebut dikategorikan sebagai PPN yaitu pajak tidak langsung. Penanggung jawab pajak, penanggung pajak, dan penanggung pajak adalah tiga komponen pajak. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan dan terletak secara terpisah. Implikasi hukum dari fitur ini adalah pihak-pihak yang terpisah bertanggung jawab dalam memikul beban pajak dan membayar pajak ke kas negara. Sedangkan penanggung jawab pajak ke Kas Negara adalah Pengusaha Kena Pajak yang bergerak sebagai penjual Barang Kena Pajak atau penyedia Jasa Kena Pajak, sedangkan penanggung beban pajak ini benar-benar bertempat sebagai konsumen Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak. Akibatnya, jika terjadi kesalahan pada pemungutan PPN.

Daftar pendapatan PT. Prima Tata Kargo selama empat bulan digunakan untuk investigasi ini karena pelaku usaha yang merupakan wajib pajak memenuhi persyaratan sebagai Subjek dan Objek PPN dan sudah lama melakukan kegiatan usaha di Indonesia dalam kegiatannya sebagai penyedia pemuatan peti kemas / layanan bongkar muat. PT. Prima Tata Kargo Grafik di bawah ini menunjukkan dari Januari hingga April 2023.

**Grafik 1.1**  
**Data Pendapatan dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**  
**PT. Prima Tata Kargo**



*Sumber : PT. Prima Tata Kargo 2023*

**Tabel 1.1.**  
**Data Pendapatan PT. Tata Prima Kargo**

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 27,013,867
2	Februari	Rp. 22,760,824
3	Maret	Rp. 30,379,432
4	April	Rp. 13,180,280
<b>Total</b>		<b>Rp. 93,334,403</b>

*Sumber : PT. Prima Tata Kargo 2023*

PT. Prima Tata Kargo dalam Pengakuan pendapatan dicatat dalam catatan akuntansi dengan menggunakan kebijakan akrual, dan pelaporan bulanan pajak pertambahan nilai juga dicatat. Berikut informasi mengenai PPN, PT. Prima Tata Kargo periode Januari s/d April 2023.

**Tabel 1.2.**  
**Data Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**  
**PT. Prima Tata Kargo**

No	Bulan	Pendapatan
1.	January	Rp. 29,689,711
2	February	Rp. 24,060,202
3	March	Rp. 25,446,101
4	April	-
<b>Total</b>		<b>Rp. 79,196,014</b>

*Sumber : PT. Prima Tata Kargo 2023*

Data dalam laporan keuangan dapat digunakan untuk meramalkan situasi masa depan perusahaan, memantau operasi bisnis saat ini, dan menilai tindakan yang dipilih perusahaan. Pelaporan keuangan dibuat dengan menggunakan SAK pada prinsip umum akuntansi, agar pembaca laporan dapat memahami laporan keuangan dengan benar. Melacak laporan keuangan yang dihasilkan oleh Perusahaan Terbuka Prima Tata Kargo saat terjadi transaksi, bukan ketika uang ditukar atau diterima, dicatat dengan metode akrual atau pencatatan langsung yang dikenal dengan metode akrual. Karena akrual melibatkan aset dan liabilitas, keduanya akan berdampak pada nilai neraca.

Penelitian pada PT. Prima Tata Kargo dilatar belakangi oleh keinginan untuk mempelajari bagaimana laporan keuangan dicatat dan apakah sudah berdasarkan atas SAK yang diakui. Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dengan judul “Analisis Hubungan Pengakuan Pendapatan Pada Metode Akrual Terhadap Pelaporan Pajak Pertambahan

Nilai Pada PT. Prima Tata Kargo Palembang” berdasarkan konteks permasalahan tersebut diatas.

## **1.2. Batasan Masalah**

Keterbatasan peneliti adalah hanya berlaku untuk transaksi dimana pengakuan pendapatan menggunakan Metode AkruaI pada PT. Prima Tata Kargo Palembang pada bulan Januari, Februari, Maret, dan April Tahun 2023 serta penghitungan dan pelaporan PPN atas transaksi tersebut.

## **1.3. Rumusan Masalah**

Bagaimana pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas penerimaan dengan menggunakan pendekatan akruaI di PT Prima Tata Kargo Palembang.

## **1.4. Tujuan Penelitian**

Didasarkan pada uraian fenomena, tujuan penelitian ini yaitu untuk menetapkan pengakuan pendapatan dengan menggunakan pendekatan akruaI pada pelaporan PPN atas perusahaan PT. Prima Tata Kargo Palembang.

## **1.5. Manfaat Penelitian**

### 1) Manfaat untuk PT. Prima Tata Kargo

Kajian ini diharap bisa memberikan masukan PT. Prima Tata Kargo dan sebagai informasi alat ukur kebijakan pengakuan pendapatan, perhitungan, dan pelaporan PPN.

### 2) Manfaat untuk Universitas PGRI Palembang

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya hasil-hasil penelitian, menjadi referensi, dan dapat menambah studi pustaka yang ada pada Universitas PGRI Palembang.